

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Berdasarkan data perkembangan inflasi di Sulawesi selama periode Triwulan I Tahun 2024 dari Bulan Januari sampai dengan Maret 2024, angka inflasi Sulawesi Barat terus mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi yang terjadi di daerah yang menjadi perhitungan IHK yakni Kota Mamuju dan Majene, pada Januari 2024 angka inflasi Sulawesi Barat meningkat dari angka 1,82% (y-o-y) menjadi 2,25% (y-o-y) hal ini dipengaruhi oleh kenaikan inflasi yang dialami oleh Kabupaten Majene yang mengalami inflasi sebesar 3,14%, (y-o-y) namun dibulan Februari 2024 angka inflasi Sulawesi Barat turun menjadi 2,22% (y-o-y) dikarenakan terjadinya penurunan inflasi di kabupaten Majene sebesar 2,59% (y-o-y) karena telah mengalami deflasi sebesar 0,42% (m-t-m), dan dibulan Maret 2024, inflasi di Sulawesi Barat meningkat menjadi 2,76% karena dipengaruhi oleh kenaikan inflasi di 2 Kabupaten yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, kenaikan inflasi ini terjadi karena di Bulan Maret 2024 tingkat permintaan masyarakat terhadap komoditas pangan jelang HBKN (Jelang Ramadhan) semakin meningkat.

Pada Triwulan I Tahun 2024, Inflasi Sulawesi Barat lebih banyak dipengaruhi oleh Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau, jika dilihat dari grafik diatas maka kelompok makanan, minuman dan tembakau inflasinya selalu mengalami peningkatan pada Bulan Maret Inflasi untuk kelompok ini mencapai 5,60% (y-o-y) dengan andil sebesar 2,07% (y-o-y), pada bulan Januari inflasi untuk kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,33 % (y-o-y) dengan andil sebesar 1,24% (y-o-y) dan Februari meningkat sebesar 3,99% (y-o-y) dengan andil sebesar 1,48% (y-o-y). Tingkat inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau di Sulawesi Barat di pengaruhi oleh kenaikan inflasi beberapa sub kelompok, sub kelompok yang mengalami inflasi y-o-y tertinggi adalah kelompok rokok dan tembakau dengan inflasi tertinggi pada bulan Januari sebesar 6,98%, Februari 6,21% dan Maret sebesar 6.20%. Selanjutnya diikuti oleh kenaikan inflasi beberapa komoditas pangan seperti beras, cabai, telur ayam ras dan aneka ikan

pada periode Januari sampai engan Maret 2024, beberapa komoditas menunjukkan tren kenaikan harga diantaranya Ikan Bandeng, Ikan Layang, bawang putih, telur ayam, gula pasir dan beras, sedangkan komoditas yang menunjukkan penurunan harga diantaranya Ikan Cakalang, Bawang Merah, Aneka Cabai dan Daging Ayam , sedangkan komoditas lain masih tetap stabil selama perode Januari sampai Maret 2024

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Provinsi Sulawesi Barat dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan yang masih tergantung pada daerah lain karena lahan pertanian yang masih tergolong sedikit karena sebagian besar lahan di Sulawesi Barat lebih besar dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi perkebunan seperti Sawit, oleh karenanya Dalam pelaksanaan pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Barat tentunya akan selalu menemukan tantangan dan kendala, oleh karena Tim Pengendali Inflasi Daerah melakukan pemetaan dan identifikasi permasalahan yang ditempuh dalam pengendalian inflasi pada periode triwulan I (Januari s/d Maret). adapun permasalahan tersebut didasarkan pada 4 strategi pengendalian inflasi adalah sebagai berikut :

1. Keterjangkauan Harga

Adanya dominasi tengkulak yang menentukan harga jual beberapa komoditas di dalam pasar, hal ini sebabkan karena petani mendapatkan modal usaha pertanian dari para tengkulak sehingga mengharuskan para petani menjual hasil pertaniannya kepada para tengkulak

2. Ketersediaan Pasokan

Pergeseran musim tanam akibat cuaca el nino yang terjadi pada tahun 2023, menyebabkan tertundanya panen di triwulan I ini sehingga beberapa komoditas mengalami kekurangan pasokan seperti Beras, cabai dan bawang merah. Keterbatasan pasokan dalam wilayah Sulawesi barat ditriwulan I ini menjadi tantangan bagi TPID Provinsi Sulawesi Barat karena pada Triwulan ini permintaan akan komoditas pangan menjadi sangat tinggi jelang HBKN.

3. Kelancaran Distribusi

Sebagian Komoditas di Sulawesi Barat masih bergantung pada wilayah luar seperti komoditas beras cabai, bawang dan beberapa lainnya yang banyak diperoleh dari Sulawesi Selatan sehingga kendala biaya transportasi yang tinggi mempengaruhi penentuan harga pangan.

4. Komunikasi Efektif

Peran aktif Tim Pengendali Inflasi Daerah dalam pengendalian inflasi hal ini terbukti dengan masih rendahnya partisipasi perangkat daerah terkait dalam setiap pelaksanaan rapat koordinasi dan teknis pengendalian inflasi di Sulawesi Barat sepanjang Triwulan I (Januari - April 2024)

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Sejumlah upaya dilakukan oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten di wilayah Sulawesi Barat untuk menjaga stabilitas harga sejumlah bahan pokok selama triwulan I 2024. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten, serta *stakeholders* terkait terus bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya pengendalian inflasi, upaya yang dilaksanakan berdasarkan 4 strategi pengendalian inflasi antara lain :

1. Keterjangkauan Harga

Dalam menjaga keterjangkauan harga sepanjang periode triwulan I 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan berbagai upaya diantaranya : Pemantauan Harga Harian, Sidak Pasar dan Distributor dan Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah melalui Pembagian Paket Pangan Murah 400 Paket di Kab. Majene dan 456 Paket di Kab. Polewali Mandar serta pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 17 Kali

2. Ketersediaan Pasokan

Dalam menjaga ketersediaan pasokan di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan I 2024 di Sulawesi Barat TPID melakukan upaya dalam rangka peningkatan produksi pertanian di Sulawesi Barat utamanya komoditas penyumbang inflasi seperti cabai rawit dan Bawang

Merah, seperti gerakan menanam dengan memberikan bantuan bibit cabai untuk 129,Ha dan 10 Ha untuk Bibit Bawang Merah

3. Kelancaran Distribusi

Dalam rangka menjaga kelancaran distribusi di Sulawesi Barat sepanjang periode triwulan I 2024, TPID melaksanakan upaya pemberian subsidi transportasi untuk komoditas beras dengan memberikan subsidi langsung kepada para pedagang beras yang ada di pasar Sentral (4 Pedagang) dan Regional Mamuju (6 Pedagang) dan Pasar Sentral Pakkola Majene (6 Pedagang), adapun besaran subsidi yang diberikan sebesar Rp. 3.000,-/Kg.

4. Komunikasi Efektif

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan mengevaluasi kinerja TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten, dilaksanakan Rapat-rapat bersama dengan seluruh TPID baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten melalui Rapat Koordinasi, High Level Meeting dan Capacity Building melalui Bimbingan Teknis TPID dan Advokasi BPS untuk TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan pelaksanaan upaya yang telah dilaksanakan oleh TPID Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka mengendalikan inflasi belum mampu menekan kenaikan inflasi terbukti dengan masih terjadinya peningkatan inflasi dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024, evaluasi terhadap pelaksanaan program antara lain

- Pelaksanaan Upaya untuk menjaga keterjangkauan harga seperti pelaksanaan Sidak Pasar ke tingkat Distributor dan Agen yang tidak menjangkau seluruh distributor dan agen pangan di Sulawesi Barat, Pelaksanaan Pembagian Paket Sembako murah yang tidak menjangkau seluruh wilayah Kabupaten di Sulawesi Barat
- Pelaksanaan Gerakan Menanam melalui Pembagian bibit sejuta cabai dan bawang merah belum memberikan signifikan
- Pelaksanaan Subsidi biaya angkut yang tidak dapat menjangkau seluruh komoditas
- Peningkatan Koordinasi melalui Rapat Koordinasi yang perlu untuk terus ditingkatkan

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dalam menghadapi inflasi pada Triwulan I, TPID Provinsi Sulawesi Barat telah merilis usulan atau rekomendasi kebijakan dalam rangka mengendalikan inflasi serta mengontrol ketersediaan pangan. Adapun rekomendasi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder
2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20% dari pagu dana desa untuk pengendalian inflasi pangan.
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam intensifikasi komoditas pertanian untuk meningkatkan kualitas dan jumlah hasil panen, serta pada sektor perikanan tangkap untuk meningkatkan efektifitas penangkapan ikan.

Penguatan Proses Bisnis dalam pemenuhan Kerjasama Antar Daerah (KAD) agar dapat

4. memenuhi kebutuhan komoditas yang belum dapat terpenuhi di Sulawesi Barat
5. Intensifikasi komoditas alternatif sebagai upaya pemenuhan komoditas dengan pasokan yang masih terbatas, antara lain mendorong praktik perikanan budidaya sebagai alternative produk perikanan tangkap yang rentan terhadap musim
6. Mengoptimalkan pengawasan terhadap jalur distribusi pangan dan percepatan penyelesaian pembangunan jalur distribusi.
7. Memperkuat koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder pemangku pengendalian inflasi utamanya dalam pelaksanaan program kerja pengendalian inflasi di Sulawesi Barat